

## **Abstrak**

Fenomena kejahatan narkoba yang merajalela di Indonesia memerlukan pendekatan yang khusus untuk menekan peredarannya termasuk dalam hal pemidanaan dan pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat yang berperan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana narkoba untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pembebasan bersyarat merupakan upaya untuk memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat secara sehat. Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana narkoba memiliki kekhususan tersendiri dalam pelaksanaannya. Hal ini berkaitan dengan upaya membasmi narkoba dalam skala luas sehingga membutuhkan kerjasama narapidana, di sisi lain hal ini bertujuan untuk deradikalisasi paham-paham radikal dari narapidana narkoba. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah kebijakan pemberian pembebasan bersyarat menurut PP Nomor 99 Tahun 2012 di lembaga Narkotika Nusakambangan? 2) Apa saja yang menjadi problematika pengusulan pemberian bersyarat menurut PP Nomor 99 Tahun 2012 di lembaga Narkotika Nusakambangan? Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pembebasan bersyarat menurut PP Nomor 99 Tahun 2012 di lembaga Narkotika Nusakambangan mencakup pengetatan syarat pengajuan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti. Pengetatan syarat ini dikhususkan bagi narapidana dari kategori tindak pidana tertentu seperti terorisme, korupsi, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

**Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, PP Nomor 99 Tahun 2012.**

## **ABSTRACT**

*The phenomenon of narcotics crime that is rampant in Indonesia requires a special approach to suppress its circulation, including in terms of punishment and penal. Correctional institutions as a place that plays a role in fostering narcotics inmates not to repeat his actions. Conditional release is an effort to restore prisoners' relations with the community in a healthy manner. Procedure for granting parole for narcotics prisoners has its own specialty in its implementation. This relates to efforts to eradicate narcotics on a large scale so that prisoners need cooperation, on the other hand it aims to deradicalize radical understandings of narcotics prisoners. The formulation of the problem in this study are 1) What is the policy on granting parole according to PP No. 99/2012 at the Narcotics Narcotics Institution? 2) What are the problems in proposing conditional giving according to Government Regulation Number 99 Year 2012 at the Nusakambangan Narcotics Institution? The research method in this study uses the sociological juridical method. The results showed that the granting of parole according to Government Regulation No. 99/2012 at the Nusakambangan Narcotics Institution includes tightening the conditions for filing Remission, Assimilation, Parole, and Leave. This tightening of conditions is specific to prisoners from certain categories of crime such as terrorism, corruption, narcotics and narcotics precursors, psychotropics, crimes against state security, gross human rights crimes and other organized transnational crimes.*

**Keywords: Parole, PP Number 99 of 2012.**

